

FAKTOR SOSIAL EKONOMI SEBAGAI PREDIKTOR PERILAKU KRIMINAL

Neneng Farida Rahmah¹, Amelia Nur Kharisma², Elim Halimatusadiyah³

^{1,2}STAI Baitul Arqom Al-Islami

³STIT Manggala

Email : nfaridarahmah@gmail.com, melameliaaa6@gmail.com, elimhalimatusadiyah@gmail.com

ABSTRACT

The increasing crime rates pose a serious challenge to security and social stability in Indonesia. This article aims to investigate the role of socioeconomic factors as predictors of criminal behavior, focusing on variables such as income, education, and social status. The method used is a qualitative approach with library research, relying on data from research journals published in 2019-2020. The findings show that poor socioeconomic conditions, such as poverty, unemployment, and social inequality, significantly increase the risk of individuals engaging in criminal activities. This research also provides insights for formulating more effective public policies for crime prevention through improved access to education, job creation, and strengthened social assistance programs.

Keywords : *crime, economy, social.*

ABSTRAK

Masalah kriminalitas yang terus meningkat menjadi tantangan serius bagi keamanan dan stabilitas sosial di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki peran faktor sosial ekonomi sebagai prediktor perilaku kriminal, dengan fokus pada variabel seperti pendapatan, pendidikan, dan status sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan library research, mengandalkan data dari jurnal penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2019-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi yang buruk, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan sosial, secara signifikan meningkatkan risiko individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal. Penelitian ini memberikan juga merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dalam pencegahan kejahatan melalui peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan program bantuan sosial.

Kata Kunci : ekonomi, kejahatan, sosial.

PENDAHULUAN

Masalah kriminalitas merupakan tantangan yang serius dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kejahatan meningkat secara signifikan, menciptakan kekhawatiran yang mendalam di kalangan publik dan pemerintah. Berdasarkan

data e-MP Robinopsnal Bareskrim Polri dari tahun 2022 ke tahun 2023 tercatat sebanyak 288.472 perkara, mencerminkan tantangan yang signifikan bagi keamanan publik di Indonesia (Yuzani, 2024). Kenaikan sebanyak 11.965 perkara dari tahun sebelumnya menunjukkan adanya dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kestabilan sosial masyarakat. Berbagai faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, ketidakpastian sosial, serta perubahan pola hidup dalam bidang teknologi dan keterhubungan global mungkin berkontribusi terhadap peningkatan ini. Khususnya, jenis kejahatan seperti kekerasan terhadap anak yang mencatat 11.084 perkaranya, menunjukkan perlunya perhatian khusus dalam pengembangan kebijakan publik dan pendekatan pencegahan yang lebih efektif.

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada tingkat keamanan dan stabilitas sosial suatu negara, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Beberapa faktor diketahui menjadi pendorong utama perilaku kriminal. Misalnya, faktor sosial, seperti ketidakstabilan dalam lingkungan sosial dan keluarga, serta ekonomi, seperti ketidaksetaraan ekonomi dan kesempatan yang terbatas, sering kali menjadi penyebab utama terjadinya tindak kejahatan. Faktor-faktor ini tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung tetapi juga menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya perilaku kriminal di berbagai tingkatan masyarakat (Utami, 2021).

Salah satu aspek yang terus dipelajari dalam kasus ini adalah peran faktor sosial ekonomi sebagai prediktor perilaku kriminal. Sosial ekonomi mencakup berbagai variabel, seperti pendapatan, pekerjaan, pendidikan, dan status sosial, yang secara kolektif mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika aspek-aspek ini terganggu atau tidak seimbang, masyarakat dapat menjadi rentan terhadap perilaku kriminal karena motivasi ekonomi yang mendasarinya atau akibat dari ketidakadilan sosial yang dirasakan (Triana, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara faktor sosial ekonomi dan perilaku kriminal. Melalui pengkajian yang lebih dalam tentang bagaimana variabel-variabel sosial ekonomi mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindak kejahatan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam pencegahan kejahatan. Dengan memperkuat bukti empiris tentang keterkaitan ini, diharapkan akan ada landasan yang lebih kuat untuk mengembangkan strategi intervensi yang lebih tepat dan berkelanjutan guna mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* untuk menganalisis faktor sosial ekonomi sebagai prediktor perilaku kriminal. Data untuk penelitian ini diambil dari sumber-sumber jurnal penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2019-2020. Metode *library research* mengharuskan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dari berbagai sumber akademik yang terpercaya. Dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia dalam literatur ilmiah, penelitian ini akan fokus pada analisis terhadap temuan-temuan sebelumnya yang mengungkap hubungan antara

variabel sosial ekonomi seperti pendapatan, pendidikan, dan status sosial dengan kecenderungan individu untuk terlibat dalam tindak kejahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Kriminal

Perilaku kriminal adalah segala bentuk aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum yang ditetapkan dalam suatu masyarakat. Definisi perilaku kriminal dapat bervariasi tergantung pada norma hukum dan sosial yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Perilaku ini dapat mencakup berbagai kegiatan mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian atau pemalsuan hingga tindak kejahatan yang lebih serius seperti perampokan, pembunuhan, atau penipuan (Yuzani, 2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku kriminal sangat kompleks dan multifaktorial. Beberapa faktor yang sering dikaji meliputi aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan. Misalnya, ketidakstabilan ekonomi, ketidaksetaraan sosial, pengaruh lingkungan yang buruk, serta faktor-faktor psikologis seperti impulsivitas dan ketidakmampuan untuk menangani tekanan emosional dapat memainkan peran penting dalam mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal (Triana, 2022).

Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur perilaku kriminal terdapat dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan. Beberapa undang-undang yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur kejahatan siber, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur kejahatan terkait narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan undang-undang dasar yang mengatur berbagai jenis kejahatan di Indonesia (Utami, 2021). Dalam menanggapi perilaku kriminal, pemerintah Indonesia juga melibatkan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung untuk melakukan penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus kriminal. Selain itu, program-program rehabilitasi dan pencegahan kriminal juga dilakukan untuk mengurangi angka kejahatan dan mengatasi faktor-faktor pendorongnya secara lebih menyeluruh.

B. Sosial Ekonomi sebagai Prediktor Perilaku Kriminal

Faktor sosial ekonomi memiliki peran penting dalam memprediksi perilaku kriminal. Teori-teori sosiologi dan kriminologi menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan sosial yang kurang menguntungkan dapat meningkatkan risiko individu untuk terlibat dalam tindakan kriminal (Fachrurrozi, 2021). Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah, dan ketidaksetaraan sosial sering kali berhubungan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan kepolisian, menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran meningkat selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 6,49%, meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 (Utami, 2021). Tingkat kemiskinan juga meningkat menjadi 10,14% pada tahun 2021 dari 9,22% pada tahun 2019. Peningkatan ini bertepatan dengan peningkatan kasus kriminalitas tertentu, seperti pencurian dan kekerasan jalanan.

Kemiskinan sering dianggap sebagai faktor utama yang mendorong perilaku kriminal. Menurut teori strain (strain theory) oleh Robert K. Merton, individu yang tidak memiliki akses ke sarana yang sah untuk mencapai tujuan yang diinginkan (seperti kekayaan atau status) mungkin beralih ke cara-cara yang tidak sah, termasuk kejahatan. Data menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sering kali juga memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Pengangguran juga berkorelasi dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Menurut teori aktivitas rutin (routine activity theory) oleh Lawrence Cohen dan Marcus Felson, pengangguran menciptakan lebih banyak kesempatan bagi individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal karena mereka memiliki lebih banyak waktu luang dan kurang terikat pada rutinitas yang sah.

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam memprediksi perilaku kriminal. Individu dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki akses yang terbatas ke pekerjaan yang sah dan berpenghasilan tinggi, yang dapat mendorong mereka untuk mencari alternatif lain, termasuk kejahatan. Ketidaksetaraan sosial, baik dalam hal pendapatan maupun kesempatan, juga dapat memicu perilaku kriminal. Menurut teori konflik (conflict theory) oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, ketidaksetaraan sosial menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat, yang dapat menyebabkan tindakan kriminal sebagai bentuk protes atau perjuangan untuk kekuasaan dan sumber daya (Yuzani, 2024).

Faktor sosial ekonomi berperan signifikan sebagai prediktor perilaku kriminal karena kondisi sosial ekonomi yang buruk sering kali menyebabkan individu mengalami tekanan dan kesulitan hidup yang berkepanjangan. Ketiadaan akses terhadap pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan yang memadai, serta layanan kesehatan yang baik dapat mendorong individu untuk mencari jalan pintas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Fachrurrozi, 2021). Ketika seseorang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, dorongan untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian atau penipuan, meningkat karena mereka merasa tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Selain itu, lingkungan sosial yang miskin sering kali memiliki tingkat kriminalitas yang lebih tinggi karena adanya ketidakstabilan sosial dan kurangnya kontrol sosial. Dalam masyarakat yang kurang stabil secara ekonomi, norma-norma sosial dan hukum sering kali lebih lemah, sehingga perilaku menyimpang menjadi lebih umum dan diterima. Kelompok-kelompok sosial yang berada di bawah tekanan ekonomi cenderung mengembangkan subkultur kriminal sebagai cara untuk bertahan hidup dan menciptakan identitas serta solidaritas di antara anggotanya (Dewantoro, 2022). Subkultur ini kemudian memperkuat perilaku kriminal sebagai norma dalam komunitas tersebut.

Kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi juga dapat menimbulkan rasa frustrasi dan kemarahan terhadap sistem sosial yang dianggap tidak adil (Utami, 2021). Ketidakpuasan ini bisa mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai bentuk protes atau upaya untuk mengambil kembali hak yang mereka rasa telah dirampas. Ketika individu merasa bahwa mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesan atau kesejahteraan melalui cara-cara yang legal dan konvensional, mereka mungkin lebih cenderung untuk mencari alternatif lain, termasuk tindakan kriminal. Faktor-faktor ini menunjukkan bagaimana

kondisi sosial ekonomi yang buruk dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya perilaku kriminal.

C. Solusi terhadap masalah Sosial Ekonomi dalam upaya Mengurangi kasus iminalitas

Salah satu solusi utama untuk mengatasi masalah sosial ekonomi yang berkaitan dengan kriminalitas adalah dengan meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan (Dewantoro, 2022). Pendidikan yang baik membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan pekerjaan yang sah dan berpenghasilan layak, sehingga dapat mengurangi insentif untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Pemerintah dapat memperluas program beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu, meningkatkan anggaran untuk infrastruktur pendidikan, dan memberikan pelatihan tambahan bagi guru untuk memastikan mereka dapat memberikan pendidikan yang berkualitas. Program pendidikan kejuruan juga perlu diperkuat untuk menyediakan keterampilan praktis yang dapat langsung digunakan di pasar kerja (Yuzani, 2024).

Mengurangi pengangguran adalah langkah kunci dalam menekan angka kriminalitas. Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan industri kreatif (Lerabeni, 2022). Insentif pajak dan dukungan finansial dapat diberikan kepada perusahaan yang membuka peluang kerja baru. Selain itu, program pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan perlu diperluas untuk membantu pengangguran mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Langkah-langkah ini tidak hanya akan mengurangi angka pengangguran tetapi juga memberikan stabilitas ekonomi yang lebih besar bagi individu dan keluarga mereka, sehingga mengurangi potensi terlibat dalam aktivitas kriminal (Yuzani, 2024).

Program bantuan sosial yang kuat dan berkelanjutan sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dua faktor yang sering berhubungan erat dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Program seperti bantuan tunai langsung, subsidi pangan, dan akses ke layanan kesehatan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat miskin (Dewantoro, 2022). Selain itu, program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit mikro dapat membantu individu untuk memulai usaha kecil dan mandiri secara ekonomi. Dengan memperkuat jaringan pengaman sosial, pemerintah dapat membantu mencegah orang terjerumus ke dalam kejahatan sebagai upaya terakhir untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Utami, 2021).

Peningkatan keadilan dalam sistem hukum juga merupakan solusi penting untuk mengurangi kriminalitas yang terkait dengan masalah sosial ekonomi (Kuciswara, 2021). Reformasi hukum yang memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak diskriminatif dapat mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan mengurangi keinginan untuk mengambil hukum ke tangan sendiri. Program rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka memiliki peluang untuk kembali ke masyarakat sebagai warga yang produktif setelah menyelesaikan masa hukuman (Lerabeni, 2022). Selain itu, pendekatan preventif seperti patroli polisi yang lebih intensif di daerah rawan dan program kemitraan masyarakat-polisi dapat membantu mendeteksi dan mencegah kejahatan sebelum terjadi.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, perilaku kriminal dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi yang kompleks. Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran, pendidikan rendah, dan ketidaksetaraan sosial merupakan faktor utama yang meningkatkan risiko individu terlibat dalam tindakan kriminal. Data dari 2021-2022 menunjukkan peningkatan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang berkontribusi pada peningkatan kasus kriminalitas. Teori-teori sosiologi dan kriminologi seperti teori strain, teori aktivitas rutin, dan teori konflik menjelaskan bagaimana kondisi sosial ekonomi yang buruk dapat mendorong individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan. Solusi untuk mengurangi kriminalitas yang berakar pada masalah sosial ekonomi melibatkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, penguatan program bantuan sosial, serta reformasi kebijakan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan merupakan langkah-langkah penting yang harus diambil. Dengan meningkatkan kesempatan ekonomi dan sosial, memberikan pendidikan yang memadai, dan memastikan sistem hukum yang adil, masyarakat dapat mengurangi tekanan ekonomi dan sosial yang mendorong perilaku kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Yuzani, D. A., & Deswina, L. F. (2024). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Tingkat Kriminalitas: Analisis di Kota Tanjungpinang. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 165-173.
- Utami, R. R., & Asih, M. K. (2021). Faktor-faktor determinasi Perilaku Kejahatan (Determination Factors of Criminal Behavior). *Psibernetika*, 14(1).
- Winda, N., & Sentosa, S. U. (2021). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tindakan Kriminalitas Di Provinsi-Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 3(4), 65-72.
- Septaria, R., & Zulfaridatulyaqin, S. M. (2021). Tingkat Kriminalitas di Kota Banjarmasin dengan Pendekatan Ekonomi. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 50-64.
- Fitriani, F., Melamba, B., Khabiirun, K., & Suddin, S. (2022). KRIMINALITAS DAN DAMPAKNYA DI KOTA RAHA KABUPATEN MUNA: STUDI KASUS KECAMATAN KATOBU DAN BATALAIWORU (1998-2020). *Journal Idea of History*, 5(1), 44-51.
- Putra, A. D., Martha, G. S., Fikram, M., & Yuhan, R. J. (2021). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kriminalitas di Indonesia Tahun 2018. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 3(2), 123-131.
- Dewantoro, D. M., & Nurhayati, S. F. (2022). *Analisis Pengaruh Kemiskinan, PDRB Perkapita, Pengangguran, dan Upah Minimum, Terhadap Tingkat Kriminalitas di Karesidenan Surakarta Tahun 2015-2020* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Desinta, D. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kejadian Kejahatan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2020. *Media Edukasi Data Ilmiah dan Analisis (MEDIAN)*, 5(01).
- Triana, A. A., & Fauzi, A. M. (2020). Dampak pandemi corona virus diserse 19 terhadap meningkatnya kriminalitas pencurian sepeda motor di Surabaya. *Syah Kuala Law Journal*, 4(3), 302-309.
- Lerabeni, M. N. (2022). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Kriminalitas di Kota Batam. *Dialektika Publik*, 6(2), 13-20.
- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 1-9.
- Fachrurrozi, K., Fahmiwati, F., Hakim, L., Aswadi, A., & Lidiana, L. (2021). Pengaruh kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas di Indonesia di tahun 2019. *Jurnal Real Riset*, 3(2), 173-178.